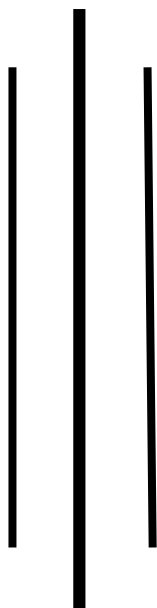




# **RENCANA KERJA**

## **(RENJA)**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KARANGASEM**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia -Nya, Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 telah selesai disusun.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja ini memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 27 Juli 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kab.Karangasem



**Drs. I Wayan Sutapa, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip.19691102 199003 1 006

**DAFTAR ISI**

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>13</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.....	26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RPJMD .....	37
2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat .....	60
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>61</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	61
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	62
3.3 Program dan Kegiatan.....	63
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>75</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah. Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan, sub kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat

ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari empat tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, forum PD, dan penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan penyusunan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah disusun mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, disusun untuk memecahkan masalah yang dihadapi, serta disusun berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Tahap penyusunan rancangan Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, dimana program dan kegiatan yang digunakan mengacu pada program dan kegiatan yang ada pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Pemerintah daerah kemudian melakukan pemetaan terhadap program dan kegiatan pada RKPD-SB 2023 berdasarkan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan menjadi acuan dalam penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah. Kemudian, APBD tahun anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Ranwal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah merumuskan rencana kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Serta memberikan arah sekaligus pedoman dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika penulisan**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN,**

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang menguraikan :

##### **1.1 Latar Belakang,**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2 Landasan Hukum,**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan,**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### **1.4 Sistematika Penulisan,**

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah , Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, Tantangan dan peluang serta Formulai isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Berisikan uraian tentang usulan program dan kegiatan masyarakat yang diakomodir oleh Perangkat Daerah

### BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah melalui usulan program kegiatan PD sesuai indikatif dan skala prioritas.

#### BAB V. PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis (renstra Perangkat Daerah) sebagai dokumen jangka menengah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada Tahun 2022 realisasi fisiknya mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 88,63 %, kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan , sehingga tidak ada kekurangan ataupun kelebihan target kinerja yang meliputi 6 Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Capaian kinerja Rencana kerja tahun 2022 dan Rencana Strategis sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel TC.29 dibawah ini:

Tabel T-C.29

## Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2022

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program		Target Program dan Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi capaian target	
					Realisasi Target Tahun 2021	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2022	Tk. Cap Trgt Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	500 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	200 Persen	40
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	200 Persen	40
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	40
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	40
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	40
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	40
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	40
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	40

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program		Target Program dan Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi capaian target	
					Realisasi Target Tahun 2021	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2022	Tk. Cap Trgt Rens tra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	40
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	500 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	200 Persen	40
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	155 Orang	29 Orang	29 Orang	100	29 Orang	58 Orang	37
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	20
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	500 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	200 Persen	40
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	40
8.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	40
8.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	40
8.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	40
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	40
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	40
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	40

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program		Target Program dan Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi capaian target	
					Realisasi Target Tahun 2021	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2022	Tk. Cap Trgt Rens tra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintaahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	40
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	200 Persen	40
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	15 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	4 unit	27
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	39 unit	2 unit	5 unit	100	5 unit	10 unit	26
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	17 unit	2 unit	2 unit	-	2 unit	4 unit	24
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	200 Persen	40
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	40
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	40
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Unit	1 Laporan	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	40
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	40
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	200 Persen	40

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program		Target Program dan Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi capaian target	
					Realisasi Target Tahun 2021	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2022	Tk. Cap Trgt Rens tra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	80 Unit	14 Unit	14 Unit	100	14 Unit	28 Unit	35
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	89 Unit	13 Unit	13 Unit	100	13 Unit	26 Unit	29
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	40
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	00	1 Unit	2 Unit	40
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	500 Persen	100 Perse n	100 Persen	100	100 Perse n	200 Persen	40
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	500 Persen	100 Perse n	100 Persen	100	100 Perse n	200 Persen	40
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen program kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter, Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan yang disusun	5 dokume n	1 doku men	1 dokume n	-	1 doku men	2 dokume n	40
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	5 dokume n	1 doku men	1 dokume n	100	1 doku men	2 dokume n	40

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program		Target Program dan Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi capaian target	
					Realisasi Target Tahun 2021	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2022	Tk. Cap Trgt Rens tra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	191 orang 0	320 orang	320 orang	100	320 orang	640 orang	34
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	115 Orang	10 Orang	10 Orang	100	10 Orang	20 Orang	17
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	40
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	500 Persen	100 Perse n	100 Persen	100	100 Perse n	200 Persen	40

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program		Target Program dan Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi capaian target	
					Realisasi Target Tahun 2021	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2022	Tk. Cap Trgt Rens tra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	500 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	200 Persen	40
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
8.01.03.2.01.02	Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program		Target Program dan Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi capaian target	
					Realisasi Target Tahun 2021	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2022	Tk. Cap Trgt Rens tra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 orang	240 orang	240 orang	100	240 orang	480 orang	32
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	225 orang	30 orang	30 orang	100	30 orang	60 orang	27
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	40
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	500 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	200 Persen	40

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program		Target Program dan Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi capaian target	
					Realisasi Target Tahun 2021	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2022	Tk. Cap Trgt Rens tra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	500 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	200 Persen	40
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	40
8.01.04.2.01.02	Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	40
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	620 Orang	80 Orang	80 Orang	100	80 Orang	160 Orang	26
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	165 orang	15 orang	15 orang	100	15 orang	30 orang	18
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	40

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program		Target Program dan Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi capaian target	
					Realisasi Target Tahun 2021	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2022	Tk. Cap Trgt Rens tra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	500 Persen	100 Perse n	100 Persen	100	100 Perse n	200 Persen	40
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	500 Persen	100 Perse n	100 Persen	100	100 Perse n	200 Persen	40
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Dokum en	1 Doku men	1 Dokum en	100	1 Doku men	2 Dokum en	40
8.01.05.2.01.02	Penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	5 Dokum en	1 Doku men	1 Dokum en	100	1 Doku men	2 Dokum en	40

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program		Target Program dan Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi capaian target	
					Realisasi Target Tahun 2021	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2022	Tk. Cap Trgt Rens tra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	155 orang 0	260 orang	260 orang	100	260 orang	520 orang	34
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	40 Orang	27
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	40
8.01.06	Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	500 Persen	100 Perse n	100 Persen	100	100 Perse n	200 Persen	40
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	500 Persen	100 Perse n	100 Persen	100	100 Perse n	200 Persen	40

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program		Target Program dan Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi capaian target	
					Realisasi Target Tahun 2021	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2022	Tk. Cap Trgt Rens tra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
8.01.06.2.01.02	Penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	310 Orang	50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	100 Orang	32

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program		Target Program dan Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi capaian target	
					Realisasi Target Tahun 2021	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2022	Tk. Cap Trgt Rens tra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	165 Orang	20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	40 Orang	24
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	4 Laporan	40
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	40

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Kualitas penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut meliputi :

1. Struktur masyarakat adat di Kabupaten Karangasem yang memiliki karakteristik kebersamaan dan gotong royong yang mendukung pengembangan budaya politik
2. Makin berperannya lembaga legislative dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat
3. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di dalam pembangunan daerah
4. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat bernegara kebangsaan
5. Berperannya pemuka agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penanganan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Semakin baiknya kerjasama dan kesigapan aparat keamanan beserta masyarakat pemuka desa adat dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban
7. Terselenggaranya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Kinerja pelayanan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem sampai dengan tahun 2022 didasarkan pada indikator Kinerja Keberhasilan sebagai Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Secara umum pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target dan pencapaian sasaran strategis dari program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Kabupaten Karangasem tahun 2022 dapat diuraikan sebagaimana Tabel T-C.30 dibawah ini

Tabel T-C.30

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem

NO	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD						Satuan	Realisasi Capaian	Proyeksi					Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	Person	100	100	100	100	100	100	
A1	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	Person	100	100	100	100	100	100	
A1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	2	2	2	2	2	Dokumen	2	2	2	2	2	2	
A1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
A1.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
A1.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
A1.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
A1.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD			1	1	1	1	1	1	Laporan	1	1	1	1	1	1	
A1.7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	1	Laporan	1	1	1	1	1	1	
A2	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	Person	100	100	100	100	100	100	
A2.1	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			29	29	30	31	32	33	Orang	29	29	30	31	32	33	

NO	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD						Satuan	Realisasi Capaian	Proyeksi						Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A2.2	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	1	1	1	1	1	Laporan	1	1	1	1	1	1		
A3	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	100		
A3.1	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan			1	1	1	1	1	1	Paket	1	1	1	1	1	1		
A3.2	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			1	1	1	1	1	1	Paket	1	1	1	1	1	1		
A3.3	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan			1	1	1	1	1	1	Paket	1	1	1	1	1	1		
A3.4	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan			1	1	1	1	1	1	Paket	1	1	1	1	1	1		
A3.5	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			1	1	1	1	1	1	Paket	1	1	1	1	1	1		
A3.6	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			1	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1		
A3.7	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			1	1	1	1	1	1	Laporan	1	1	1	1	1	1		
A3.8	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1		
A4	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	100		
A4.1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan			2	2	2	2	4	5	unit	2	2	2	2	4	5		
A4.2	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			5	5	7	7	10	10	unit	5	5	7	7	10	10		

NO	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD						Satuan	Realisasi Capaian	Proyeksi						Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A4.3	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			2	2	3	3	4	5	unit	2	2	3	3	4	5		
A5	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	100	Persentase	100	100	100	100	100	100		
A5.1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	1	1	1	1	1	Laporan	1	1	1	1	1	1		
A5.2	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			1	1	1	1	1	1	Laporan	1	1	1	1	1	1		
A5.3	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			1	1	1	1	1	1	Laporan	1	1	1	1	1	1		
A5.4	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			1	1	1	1	1	1	Laporan	1	1	1	1	1	1		
A6	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	100	Persentase	100	100	100	100	100	100		
A6.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya			14	14	15	16	17	18	Unit	14	14	15	16	17	18		
A6.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			13	13	15	17	21	23	Unit	13	13	15	17	21	23		
A6.3	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi			1	1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	1	1		
A6.4	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi			1	1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	1	1		
B	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan			100	100	100	100	100	100	Persentase	100	100	100	100	100	100		

NO	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD						Satuan	Realisasi Capaian	Proyeksi						Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
B1	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			100	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	100		
B1.1	Jumlah Dokumen program kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter, Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan yang disusun			1	1	1	1	1	1	dokumen	1	1	1	1	1	1		
B1.2	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun			1	1	1	1	1	1	dokumen	1	1	1	1	1	1		
B1.3	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			320	320	350	380	410	450	orang	320	320	350	380	410	450		
B1.4	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			10	10	15	20	30	40	Orang	10	10	15	20	30	40		
B1.5	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan			1	1	1	1	1	1	Laporan	1	1	1	1	1	1		
C	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			100	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	100		
C1	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			100	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	100		

NO	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD						Satuan	Realisasi Capaian	Proyeksi						Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
C1.1	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1	1	1	1	1	1	dokumen	1	1	1	1	1	1		
C1.2	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun			1	1	1	1	1	1	dokumen	1	1	1	1	1	1		
C1.3	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			240	240	260	280	320	400	orang	240	240	260	280	320	400		
C1.4	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			30	30	40	45	50	60	orang	30	30	40	45	50	60		
C1.5	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1	1	1	1	1	1	Laporan	1	1	1	1	1	1		
D	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			100	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	100		
D1	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			100	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	100		

NO	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD						Satuan	Realisasi Capaian	Proyeksi						Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
D1.1	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			1	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1		
D1.2	Jumlah Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun			1	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1		
D1.3	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			80	80	100	120	140	180	Orang	80	80	100	120	140	180		
D1.4	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			15	15	25	35	40	50	orang	15	15	25	35	40	50		
D1.5	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			1	1	1	1	1	1	Laporan	1	1	1	1	1	1		
E	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			100	100	100	100	100	100	Person	100	100	100	100	100	100		
E1	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			100	100	100	100	100	100	Person	100	100	100	100	100	100		
E1.1	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1		

NO	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD						Satuan	Realisasi Capaian	Proyeksi						Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
E1.2	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun			1	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1		
E1.3	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			260	260	285	310	335	360	orang	260	260	285	310	335	360		
E1.4	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			20	20	25	30	35	40	Orang	20	20	25	30	35	40		
E1.5	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1	1	1	1	1	1	Laporan	1	1	1	1	1	1		
F	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial			100	100	100	100	100	100	Persentase	100	100	100	100	100	100		
F1	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			100	100	100	100	100	100	Persentase	100	100	100	100	100	100		
F1.1	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			1	1	1	1	1	1	dokumen	1	1	1	1	1	1		

NO	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD						Satuan	Realisasi Capaian	Proyeksi					Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
F1.2	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun			1	1	1	1	1	1	dokumen	1	1	1	1	1	1	
F1.3	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			50	50	55	60	70	75	Orang	50	50	55	60	70	75	
F1.4	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			20	20	25	30	40	50	Orang	20	20	25	30	40	50	
F1.5	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			2	2	2	2	2	2	Laporan	2	2	2	2	2	2	
F1.6	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota			1	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kehidupan kepariwisataan Kabupaten Karangasem di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi menjadikan Kabupaten Karangasem sebagai daerah yang sangat terbuka dari berbagai interaksi, baik interaksi individu, kelompok, interaksi budaya, interaksi kepentingan dan berbagai interaksi lainnya yang terkait dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta keamanan dan ketertiban. Kondisi diatas menjadi tingkat heterogenitas dalam dinamika kehidupan masyarakat Karangasem menjadi semakin luas dan kompleks. Heterogenitas tersebut diatas pada hakekatnya mengandung berbagai perbedaan yang mengandung potensi konflik. Heterogenitas tersebut jika dikelola dengan baik dan terarah diharapkan dapat menjadi potensi pembangunan, tetapi jika tidak dikelola secara baik dan terarah akan dapat menimbulkan kerawanan social maupun politik yang mengarah pada konflik sosial di masyarakat.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menyangkut :

1. Belum maksimalnya partisipasi pemilih pada pemilihan umum.

Pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat terlepas dari partisipasi pemilih, partisipasi pemilih akan mempengaruhi tingkat capaian kesuksesan dari pada pemilu tersebut, sehingga peningkatan partisipasi pemilih sangatlah penting dalam pemilu.

2. Masih kurangnya wawasan politik masyarakat.

Wawasan politik pada masyarakat perlu ditingkatkan dalam peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan gambaran pada setiap provinsi di Indonesia baik berada pada tingkat demokrasi baik, sedang maupun buruk, dengan hal tersebut pemerintah pusat atau provinsi/daerah dapat memberikan prioritas pembangunan politik di daerah tersebut.

3. Belum maksimalnya komunikasi pemerintah daerah dengan partai politik. Sebagai wadah dalam melaksanakan komunikasi maupun koordinasi perlu dibentuk sebuah forum diskusi politik yaitu dalam hal pembahasan pembangunan dan pembanguna politik yang baik di daerah.

4. Belum maksimalnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam berpartisipasi untuk pembangunan di daerah. Keberadaan organisasi kemasyarakatan di daerah sangat penting yaitu untuk berpartisipasi dalam pembangunan di daerah, organisasi kemasyarakatan perlu difasilitasi dan diberikan pembinaan. Disamping itu juga Pemerintah Daerah memiliki peran menjaga keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan di daerah, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dapat diberikan melalui fasilitasi kebijakan, Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Belum maksimalnya pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. Pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan wajib dilakukan agar adanya kontroling pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap Ormas guna untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari ormas tersebut, pengawasan yang dilakukan bersifat eksternal.
6. Belum tuntasnya pemahaman terhadap Ideologi Negara dan rasa Nasionalisme yang ditanamkan kepada generasi muda khususnya di Kabupaten Karangasem .
7. Masih adanya potensi konflik sosial yang tinggi bersumber dari penyelesaian batas wilayah desa adat dan dinas yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat.
8. Masih rendahnya kemampuan aparat dan masyarakat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini sebagai gejala sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
9. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing dan provokasi orang/kelompok yang tidak bertanggung jawab yang mengancam keutuhan Negara.
10. Masih perlunya pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi : peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa, bintek peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama, bintek peningkatan nilai luhur budaya bangsa.
11. Masih perlunya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, seperti: fasilitasi terhadap pelestarian ketahanan kreasi seni dan budaya, seminar peningkatan ketahanan kebangsaan bagi penganut aliran kepercayaan.

12. Masih perlunya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) meliputi: penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, penyuluhan berkembangnya praktik prostitusi, penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur.

Adapun dampak dari permasalahan dan hambatan tersebut terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah semakin beratnya tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tupoksinya sehingga perlu peningkatan kinerja dan tentunya penambahan SDM kedepannya.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pembangunan Kabupaten Karangasem sebagaimana Rancangan awal RKPD disebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2024 merupakan rangkaian tahapan pencapaian Visi Kabupaten Karangasem dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

Berkaitan dengan kewenangan Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang diampu sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem melaksanakan penunjang urusan Pemerintahan umum bidang Kesatuan bangsa dan politik.

Penjelasan temuan –temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya; terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda Review terhadap rancangan awal RKPD agar dapat berjalan secara terpadu dan sinergi dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dari uraian tersebut tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem pada tahun 2024 sangat kompleks dan membutuhkan sumber daya manusia yang profesional disamping sumber anggaran yang tersedia. Review terhadap rancangan awal RKPD terdapat pada tabel T-C.31

Tabel T-C.31

## Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Karangasem

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 Persen	4.920.984.698	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 Persen	4.788.050.000	
A1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karangasem	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	65.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karangasem	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	66.000.000	
A1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karangasem	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karangasem	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.000.000	
A1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Karangasem	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Karangasem	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
A1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Karangasem	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Karangasem	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	
A1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Karangasem	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Karangasem	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Karang asem	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Karang asem	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	
A1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karang asem	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	27.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karang asem	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	27.000.000	
A1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.500.000	
A2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karang asem	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.673.934.698	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karang asem	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.502.500.000	
A2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karang asem	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 Orang	3.671.434.698	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karang asem	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang	3.500.000.000	
A2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Karang asem	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Karang asem	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000	
A3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karang asem	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	358.550.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karang asem	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	353.550.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karang asem	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karang asem	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.000.000	
A3.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Karang asem	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	5.000.000						
A3.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Karang asem	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Karang asem	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	15.000.000	
A3.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Karang asem	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	184.550.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Karang asem	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	184.550.000	
A3.5	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Kab. Karang asem	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	44.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Kab. Karang asem	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	44.000.000	
A3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karang asem	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karang asem	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	18.000.000	
A3.7	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Karang asem	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Karang asem	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	80.000.000	
A3.8	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karang asem	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	9.000.000	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karang asem	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	9.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karang asem	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	161.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karang asem	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	161.000.000	
A4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Karang asem	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	70.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Karang asem	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	70.000.000	
A4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karang asem	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 unit	65.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karang asem	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 unit	65.000.000	
A4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karang asem	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 unit	26.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karang asem	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 unit	26.000.000	
A5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karang asem	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	350.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karang asem	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	350.000.000	
A5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karang asem	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	55.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karang asem	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	55.000.000	
A5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karang asem	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karang asem	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	70.000.000	
A5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karang asem	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	55.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karang asem	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	55.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karang asem	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	170.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karang asem	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	170.000.000	
A6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karang asem	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	312.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karang asem	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	355.000.000	
A6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karang asem	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	16 Unit	290.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karang asem	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	16 Unit	290.000.000	
A6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karang asem	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	17 Unit	12.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karang asem	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	17 Unit	15.000.000	
A6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kab. Karang asem	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kab. Karang asem	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	50.000.000	
A6.4	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karang asem	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	1 Unit	5.000.000						

NO	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kab. Karangasem	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	618.750.000	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kab. Karangasem	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.926.973.000	
B1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Karangasem	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	618.750.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Karangasem	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.926.973.000	
B1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Karangasem	Jumlah Dokumen program kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter, Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan yang disusun	1 dokumen	1.250.000						
B1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Kab. Karangasem	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan yang disusun	1 dokumen	1.500.000						

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kebangsaan										
B1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	380 orang	592.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	380 orang	2.926.973.000	
B1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15 Orang	20.000.000						

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Karang asem	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	1 Laporan	4.000.000						
C	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kab. Karang asem	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	52.893.750.000	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kab. Karang asem	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	73.571.249.100	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Karangasem	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	52.893.750.000	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Karangasem	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	73.571.249.100	
C1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	Kab. Karangasem	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 dokumen	1.250.000						

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
C1.2	Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Karangasem	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	1 dokumen	1.500.000						

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C1.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	280 orang	52.852.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	280 orang	73.240.090.100	
C1.4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 orang	35.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan	45 orang	305.076.700	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Situasi Politik di Daerah					Situasi Politik di Daerah					
C1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Karangasem	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	4.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Karangasem	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	26.082.300	
D	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Karangasem	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	206.750.000	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Karangasem	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	217.004.900	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Karangasem	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	206.750.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Karangasem	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	217.004.900	
D1.1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Karangasem	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Dokumen	750.000						
D1.2	Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Karangasem	Jumlah Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	1 Dokumen	2.500.000						

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D1.3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	194.000.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	67.737.900	
D1.4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	35 orang	5.000.000	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	35 orang	73.165.100	
D1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Kab. Karang asem	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	4.500.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Kab. Karang asem	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	76.101.900	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
E	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kab. Karang asem	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100 Persen	476.250.000	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kab. Karang asem	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100 Persen	450.000.000	
E1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Karang asem	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	476.250.000	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Karang asem	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	450.000.000	
E1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	1.250.000						

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E1.2	Penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	1 Dokumen	2.500.000						
E1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	310 orang	450.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	310 orang	450.000.000	

NO	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Orang	20.000.000						
E1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	2.500.000						

NO	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F	Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Kab. Karang asem	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 Persen	873.750.000	Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Kab. Karang asem	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 Persen	867.000.000	
F1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Karang asem	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	873.750.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Karang asem	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	867.000.000	
F1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Kab. Karang asem	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 dokumen	1.250.000						

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Konflik di Daerah										
F1.2	Penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	1 dokumen	1.500.000						

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	492.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	492.000.000	
F1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	45.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Kab. Karang asem	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 Orang	45.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	serta Penanganan Konflik di Daerah					serta Penanganan Konflik di Daerah					
F1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	4.000.000						
F1.6	Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	Kab. Karang asem	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	330.000.000	Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Kab. Karang asem	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	330.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target / Volume	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH					59.990.234.69 8	JUMLAH					82.820.277.00 0

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan ditelaah berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi dan menunjang program pemerintah. Setiap usulan program, kegiatan dan sub kegiatan nantinya diharapkan mampu mendukung dan mewujudkan program kerja kepala daerah. Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan haruslah mengedepankan skala prioritas demi terwujudnya perencanaan yang dapat dipertanggung jawabkan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik haruslah didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menyangkut Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun nantinya diharapkan mampu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas, koprehensif dan mengedepankan skala prioritas. Dalam hal ini Kesbangpol mengakomodir usulan program dari masyarakat, yang diajukan lewat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) setelah di cek dalam SIPD, tidak ada usulan masyarakat maupun Pokir DPRD yang masuk.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMN 2020- 2024 dengan visi" Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", di wujudkan melalui Sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sesuai Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik, maka prioritasnya adalah keamanan dan ketertiban. Dalam melaksanakan tupoksi ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senantiasa lebih sering berkordinasi dengan Instansi/aparat keamanan yang ada di kabupaten, Provinsi maupun Pusat. Arah kebijakan nasional adalah tetap menjaga situasi, kondisi agar tetap kondusif demi tegaknya NKRI.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian sasaran dan tujuan Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem.

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem adalah :

1. Peningkatan pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan
2. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Pelaksanaan Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Adapun penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 bertujuan untuk mengkomodir semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dapat diartikan sebagai instrumen dari kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Dalam perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ini direncanakan ada enam program utama dalam pencapaian sasaran peningkatan PAD baik yang berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan PAD maupun yang berpengaruh secara tidak langsung. enam program ini merupakan penjabaran dari kebijakan dasar yang ditetapkan. Program tersebut diantaranya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial. Untuk lebih rinci, program dalam Rencana Kerja tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dapat dilihat dalam table TC.33. Keseluruhan program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem direncanakan dibiayai dari APBD Kabupaten Karangasem.

Setiap program yang telah direncanakan, dijabarkan lebih teknis kedalam kegiatan-kegiatan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut.

Kegiatan dijelaskan dengan penetapan indikator kinerja yang sifatnya cenderung dengan maksud untuk mempermudah pengukuran dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan. Namun tidak menghindari juga penggunaan indikator kualitatif yang akan dapat mendukung angka dan presentase dari target yang telah ditetapkan karena sifat indikator kualitatif yang kaya informasi sehingga menghidupkan informasi hasil dari suatu kegiatan.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024, direncanakan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai sasaran strategis, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN

##### A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

##### A1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

A1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

A1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

A1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

A1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

A1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

A1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### A2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

A2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

##### A3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

A3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

A3.2 Penyediaan peralatan rumah tangga

A3.3 Penyediaan bahan logistik kantor

A3.4 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

A3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- A3.6 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- A3.7 Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- A4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - A4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- A5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - A5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - A5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - A5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - A5.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- A6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - A6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - A6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- B Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
  - B1 Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
    - B1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- C Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
  - C1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
    - C1.3 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

C1.4 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

C1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

D Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

D1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

D1.3 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

D1.4 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

D1.5 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

E Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

E1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- E1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- F Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
  - F1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
    - F1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
    - F1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
    - F1.6 Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

Program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel TC-33.

Tabel T-C.33

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan maju Tahun 2025

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
					Target Cap Kinerja	Keb Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Cap Kinerja	Keb Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karang asem	Persen	100	4.467.395.451	APBD		100	4.967.484.698
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karang asem	Persen	100	50.616.200	APBD		100	66.000.000
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karang asem	Dokumen	2	22.865.600	APBD		2	26.000.000
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Karang asem	Dokumen	1	2.000.000	APBD		1	2.000.000
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Karang asem	Dokumen	1	2.500.000	APBD		1	2.500.000
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Karang asem	Dokumen	1	2.500.000	APBD		1	2.500.000
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Karang asem	Dokumen	1	3.500.000	APBD		1	3.500.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
					Target Cap Kinerja	Keb Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Cap Kinerja	Keb Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karang asem	Laporan	1	27.000.000	APBD		1	27.000.000
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karang asem	Laporan	1	2.500.000	APBD		1	2.500.000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karang asem	Persen	100	3.502.500.000	APBD		100	3.673.934.698
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Karang asem	Orang	31	3.500.000.000	APBD		31	3.671.434.698
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karang asem	Laporan	1	2.500.000	APBD		1	2.500.000
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karang asem	Persen	100	353.550.000	APBD		100	353.550.000
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Karang asem	Paket	1	3.000.000	APBD		1	3.000.000
8.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Karang asem	Paket	1	15.000.000	APBD		1	15.000.000
8.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Karang asem	Paket	1	184.550.000	APBD		1	184.550.000
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kab. Karang asem	Paket	1	44.000.000	APBD		1	44.000.000
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Karang asem	Dokumen	1	18.000.000	APBD		1	18.000.000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Karang asem	Laporan	1	80.000.000	APBD		1	80.000.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
					Target Cap Kinerja	Keb Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Cap Kinerja	Keb Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karang asem	Dokumen	1	9.000.000	APBD		1	9.000.000
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karang asem	Persen	100	161.000.000	APBD		100	161.000.000
8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kab. Karang asem	Unit	2	70.000.000	APBD		2	70.000.000
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Karang asem	Unit	7	65.000.000	APBD		7	65.000.000
8.01.01.2.07.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Karang asem	Unit	3	26.000.000	APBD		3	26.000.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karang asem	Persen	100	350.000.000	APBD		100	350.000.000
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karang asem	Laporan	1	55.000.000	APBD		1	55.000.000
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Karang asem	Laporan	1	70.000.000	APBD		1	70.000.000
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Karang asem	Laporan	1	55.000.000	APBD		1	55.000.000
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Karang asem	Laporan	1	170.000.000	APBD		1	170.000.000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karang asem	Persen	100	355.000.000	APBD		100	355.000.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
					Target Cap Kinerja	Keb Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Cap Kinerja	Keb Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	Kab. Karang asem	Unit	16	290.000.000	APBD		16	290.000.000
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Karang asem	Unit	17	15.000.000	APBD		17	18.000.000
8.01.01.2.09.07	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Rehabilitasi/dipelihara	Kab. Karang asem	Unit	1	50.000.000	APBD		1	55.000.000
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kab. Karang asem	Persen	100	2.926.973.000	APBD		100	2.926.973.000
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Karang asem	Persen	100	2.926.973.000	APBD		100	2.926.973.000
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Karang asem	orang	380	2.926.973.000	APBD		380	2.926.973.000
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kab. Karang asem	Persen	100	73.571.249.100	APBD		100	5.616.359.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Kab. Karang asem	Persen	100	73.571.249.100	APBD		100	5.616.359.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
					Target Cap Kinerja	Keb Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Cap Kinerja	Keb Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemantauan Situasi Politik	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Karang asem	orang	280	73.240.090.100	APBD		280	5.285.200.000
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Karang asem	orang	45	305.076.300	APBD		45	305.076.300
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Karang asem	Laporan	1	26.082.300	APBD		1	26.082.300

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
					Target Cap Kinerja	Keb Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Cap Kinerja	Keb Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Karangasem	Persen	100	217.009.900	APBD		100	343.267.000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Karangasem	Persen	100	217.009.900	APBD		100	343.267.000
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Karangasem	Orang	120	67.737.900	APBD		120	194.000.000
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Karangasem	orang	35	73.165.100	APBD		35	73.165.100
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Karangasem	Laporan	1	76.101.900	APBD		1	76.101.900
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kab. Karangasem	Persen	100	450.000.000	APBD		100	450.000.000
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Karangasem	Persen	100	450.000.000	APBD		100	450.000.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
					Target Cap Kinerja	Keb Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Cap Kinerja	Keb Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Karang asem	orang	310	450.000.000	APBD		310	450.000.000
8.01.06	Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Kab. Karang asem	Persen	100	867.000.000	APBD		100	867.000.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Karang asem	Persen	100	867.000.000	APBD		100	867.000.000
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Karang asem	Orang	60	492.000.000	APBD		60	492.000.000
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Karang asem	Orang	30	45.000.000	APBD		30	45.000.000
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	Kab. Karang asem	Dokumen	1	124.960.000	APBD		1	330.000.000
<b>JUMLAH</b>						51.370.978.971				15.171.083.698

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem selalu berpedoman pada prioritas mengingat keterbatasan dana dan sesuai renstra Badan Kesbangpol. Berdasarkan Renstra rencana kerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 dari 6 Program dan 10 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang tertuang dalam renja dengan pagu indikatif sebesar Rp. 51.370.978.971 sesuai dengan Renja Badan Kesbangpol, sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol  
Kabupaten Karangasem Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target/ Volume	Pagu Dana (Rp.)	
				2024	2025
1	2	3	4	5	6
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 Persen	4.467.395.451	4.815.984.698
A1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	52.383.024	65.500.000
A1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.290.812	26.000.000
A1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.197.600	2.000.000
A1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.659.500	2.500.000
A1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.932.500	2.500.000
A1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.400.000	3.500.000
A1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.902.612	27.000.000
A1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	2.000.000
A2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.455.537.743	3.673.934.698
A2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang	3.454.112.743	3.671.434.698

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target/ Volume	Pagu Dana (Rp.)	
				2024	2025
1	2	3	4	5	6
A2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.425.000	2.500.000
A3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	376.691.676	353.550.000
A3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.759.800	3.000.000
A3.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	12.724.500	15.000.000
A3.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	228.680.300	184.550.000
A3.5	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	38.527.076	44.000.000
A3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	15.000.000	18.000.000
A3.7	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	70.000.000	80.000.000
A3.8	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8.000.000	9.000.000
A5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	220.359.284	350.000.000
A5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.965.612	55.000.000
A5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	38.000.000	70.000.000
A5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	40.000.000	55.000.000
A5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	117.393.672	170.000.000
A6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	362.423.724	308.000.000
A6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	15 Unit	347.423.724	290.000.000
A6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15.000.000	18.000.000
B	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.110.088.736	1.600.000.000
B1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.110.088.736	1.600.000.000
B1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 orang	1.021.241.736	1.600.000.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target/ Volume	Pagu Dana (Rp.)	
				2024	2025
1	2	3	4	5	6
B1.8	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	50 orang	1.056.927.000	1.600.000.000
B1.9	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	31.920.000	1.600.000.000
C	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	43.794.680.436	5.324.200.000
C1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	43.794.680.436	5.324.200.000
C1.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	280 orang	43.613.915.636	5.285.200.000
C1.4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 orang	56.963.600	35.000.000
C1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	123.801.200	4.000.000
D	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	167.730.000	203.500.000
D1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	167.730.000	203.500.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target/ Volume	Pagu Dana (Rp.)	
				2024	2025
1	2	3	4	5	6
D1.3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	132.570.000	194.000.000
D1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	35.160.000	4.500.000
E	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100 Persen	393.341.636	450.000.000
E1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	393.341.636	450.000.000
E1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	310 orang	393.341.636	450.000.000
F	Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 Persen	437.742.712	867.000.000
F1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	437.742.712	867.000.000
F1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	293.151.612	492.000.000
F1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	19.644.400	45.000.000
F1.6	Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	124.946.700	330.000.000
JUMLAH				51.370.978.971	13.260.684.698

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan kewajiban setiap unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam waktu satu tahun.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021 - 2026, yang memuat pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu , Tujuan , sasaran, Program dan kegiatan yang disusun dan bersifat indikatif.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan merumuskan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang dituntut untuk bisa tampil dan berperan aktif dalam memantapkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan kondisi sosial politik dan keamanan di Kabupaten Karangasem.

Demikian Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

Amlapura, 27 Juli 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Karangasem



**Drs. I Wayan Sutapa, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 19691102 199003 1 006